



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 80 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 139 dan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa Rancangan Akhir Renja disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi, dan setelah diverifikasi disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

- Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
 19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
 20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);

22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2021 tentang Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 93);
23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
24. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 17);
25. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten

dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.

4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting,

mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
18. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
19. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.
20. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
22. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
23. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas/layanan kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
24. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
25. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

26. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
27. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Renstra Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Renja Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan sasaran strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Dinas yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 adalah
 - a. sebagai dokumen perencanaan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk kurun waktu Tahun 2024 yang mencakup program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan

kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

- b. sebagai instrumen evaluasi capaian tolok ukur kinerja impact sasaran, *outcome* program dan *output* kegiatan Renja tahun sebelumnya dan capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 adalah :
- a. Sebagai acuan dalam mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah daerah.
 - b. Menjadi pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024.
 - c. menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2024 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

BAB IV SISTEMATIKA RENJA

Pasal 4

- (1) Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas, Review terhadap rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Dinas

Bab ini berisi tentang Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas, program dan Kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024.

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

- (2) Uraian Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 melalui penyusunan Renja tiap tahunnya.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan Renja melalui penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tahun 2024.
- (3) Penyusunan dan pelaksanaan RKA dan DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 berpedoman atau mengacu pada indikator kinerja sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif yang telah ditentukan dalam Renja Dinas Tahun 2024.

BAB VI PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan Renja;
 - b. pelaksanaan Renja; dan
 - c. hasil capaian Renja.

- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Bappelitbangda secara berkala.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
 - a. Program dan/atau kegiatan dan/atau sub kegiatan Pembangunan Daerah;
 - b. Target dan Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah;
 - c. Target dan Capaian Indikator Kinerja Program dan/atau Kegiatan dan/atau sub kegiatan Pembangunan Daerah;
 - d. Target dan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK); dan
 - e. Target dan Capaian Indikator *Sustainable Development Goals* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- (6) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui supervisi pelaksanaan Renja Dinas dan didukung aplikasi Simonek untuk monitoring dan evaluasi capaian indikator kinerja *output*, *outcome* dan sasaran strategis Dinas dan kinerja daerah.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas selaku Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target sasaran strategis atau indikator kinerja utama dinas yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala paling lambat tiap triwulan.
- (2) Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang atau pejabat fungsional yang setara selaku Pejabat Administrasi mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target *outcome* program yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 dan indikator kinerja kunci yang bersifat *outcome* dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala tiap bulan atau paling lambat tiap triwulan.
- (3) Pejabat Pengawas atau pejabat fungsional yang setara yang ditunjuk sebagai sub koordinator dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target *output* kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 dan indikator kinerja kunci yang bersifat *output* dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala tiap bulan atau paling lambat tiap triwulan.

- (4) Evaluasi terhadap capaian realisasi indikator kinerja dampak, *outcome* dan *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan dan diinput melalui aplikasi Simonek dengan dilampiri atau diupload bukti pendukungnya.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran mempunyai kewajiban menyampaikan laporan realisasi capaian indikator kinerja dan realisasi keuangan yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 baik secara triwulan, semester maupun akhir tahun.
- (2) Laporan realisasi keuangan dan capaian indikator kinerja secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbangda.

BAB VII

PENYESUAIAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 9

- (1) Renja Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Penjabaran dari Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi capaian Renstra, tujuan, sasaran dinas, program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif yang dituangkan dalam Renja.
- (3) Penyusunan nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan serta indikator sub kegiatan pada Renja Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 September 2023

BUPATI CIREBON,



Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR

Lampiran Peraturan Bupati Cirebon

Nomor : 80 Tahun 2023

Tanggal : 27 September 2023

Tentang : Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

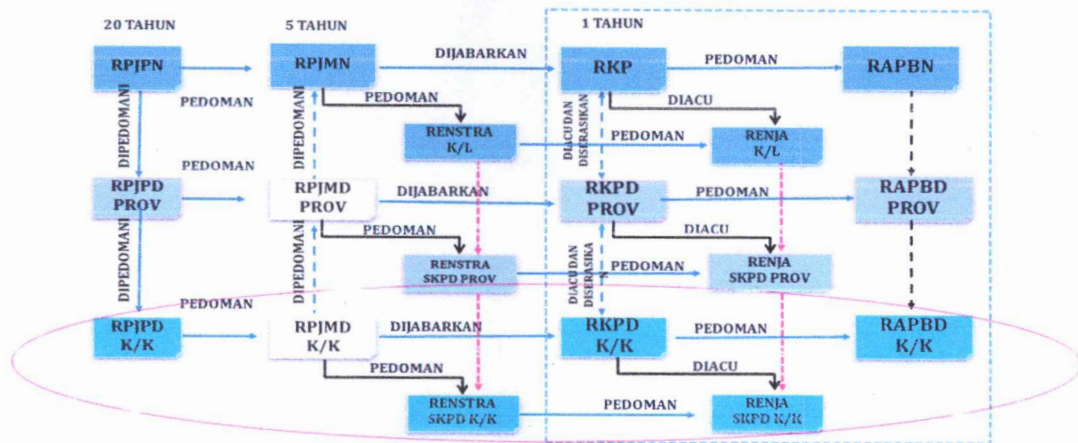
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan komunikasi dan informasi, urusan statistik dan urusan persandian, dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel di bidang Komunikasi dan Informatika. Dengan terbentuknya dinas ini, diharapkan masyarakat memperoleh dan memanfaatkan informasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan sedangkan bagi pemerintah diharapkan terwujudnya implementasi *e-government*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu adanya rencana strategis bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon berkewajiban menyusun rencana strategis. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), yang berbunyi : "Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Pasal 273 ayat (1) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah RPJMD ditetapkan. (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Keterkaitan antara RPJMD dan Renstra dalam sistem perencanaan pembangunan dapat dilihat pada Gambar 1.1.

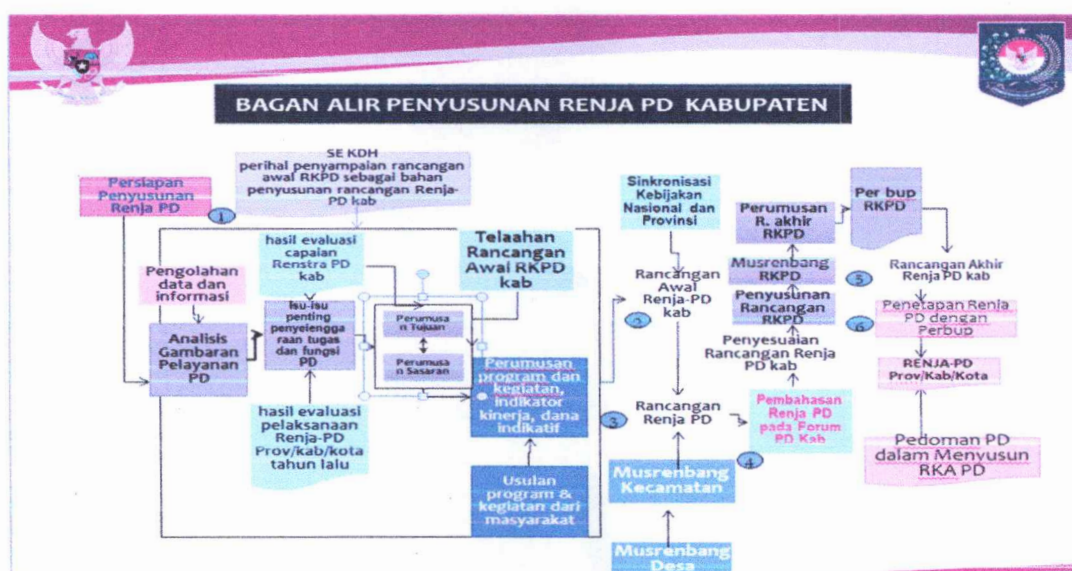
SKEMA RPJMD DAN RENSTRA PD DALAM RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH



Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Bagan diatas menunjukkan alur penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang berpedoman pada RPJMD dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Dokumen Renstra Perangkat Daerah adalah penjabaran RPJMD, terkait dengan program dan kegiatan perangkat daerah dalam mendukung prioritas Bupati. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJMD dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode (satu) tahun. Berikut bagan alir penyusunan Renja dapat dilihat pada gambar berikut.



Seiring dengan tuntutan agar pemerintah lebih efektif dan efisien di satu sisi dan di sisi lain pihak dunia usaha dan masyarakat dapat berperan lebih besar dalam berbagai kegiatan pembangunan, maka Pemerintah Kabupaten Cirebon harus lebih memantapkan fungsinya sebagai regulator, fasilitator dan *controller* sehingga pengendalian pembangunan kepada masyarakat tetap terjaga.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 204 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerahsebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 136);
 14. Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 112);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi pemerintahan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

- Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2011, Seri E.5);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 2 Seri E.2);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038.
 28. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Kabupaten Cirebon;

30. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024;
31. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
32. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 56 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Cirebon;
33. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 140 Tahun 2022 tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
34. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.1/Kep.36-Org/2022 tentang Uraian Tugas Sub Koordinator pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dokumen perencanaan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk kurun waktu tahun 2024 yang mencakup program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD;
2. Sebagai instrumen evaluasi capaian tolok ukur kinerja *impact* sasaran, *outcome* program dan output kegiatan Renja tahun sebelumnya dan capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Sebagai acuan dalam mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah daerah;
2. Menjadi pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyusun rencana kerja dan anggaran tahun 2024;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun 2024 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu

Bab ini berisi tentang Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas, Review terhadap rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Telaahan terhadap kebijaka nasional, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas, program dan Kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024.

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Diskominfo Kabupaten Cirebon tahun 2022 didasarkan pada Renstra Diskominfo Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, untuk mengetahui:

1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra Diskominfo;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut;

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Diskominfo Kabupaten Cirebon tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Kode	Sasaran/Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra PD (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja s.d Thn 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program PD thn 2022				Target dan Realisasi Kinerja Program PD thn 2023		Perkiraan Realisasi renstra PD s/d Thn berjalan			
			K	Rp	K	Rp	Target Renja PD 2022	Realisasi Renja PD Thn 2022	Tingkat Realisasi 1 (%)	Target Renja PD Thn 2023	Realisasi capaian s/d Thn 2023	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)	K	Rp	K	Rp
2.16.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
2.16.0 1.	PROGRAM PENGUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemerintah pelayanan administrasi perkantoran, Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik, Terperuhnya peningkatan disiplin aparat dalam berpakaian dinas, Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang- undangan,	100	16.276.909.600	80,51	979.818.435	90	1.017.470.02 2	95,56	994.120.792	97,70	100	977.136.510			
			100	17.409.950.000	83,11	102.468.500,	90	104.552.000	90,97	95.195.900	91,05	100	209.756.500			
			100	329.000.000	0	0	100	38.529.345	98,33	38.529.345	100	100	41.025.600			
			100	26.300.085.000	100	3.793.674.283	100	4.779.498.95 0	100	4.428.407.333	92,65	100	4.592.915.400			

Kode	Sasaran/Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra PD (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja s.d Thn 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program PD thn 2022				Target Renja PD Thn 2023		Perkiraan Realisasi renstra PD s/d Thn berjalan		Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Tingkat Realisasi 1 (%)	K	Rp	K	Rp	K
		Persentase dokumen perencanaan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang- undangan,	100	740.000.000	100	36.444.900	100	43.946.400	100	43.946.400	100	100.400.200				
2.16.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang dibuat dalam satu tahun, (Satuan: Dokumen)	74	390.000.000	14	80.958.400	14	92.445.850	14	92.445.850	100	100.400.200				
2.16.0 1.2.01. 01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun, (Satuan: dokumen)	6	140.000.000	2	36.444.900	2	43.946.400	2	43.946.400	100	37.526.000				
2.16.0 1.2.01. 06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerjanya SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja, (Satuan: dokumen)	35	250.000.000	12	44.513.500	12	48.499.450	12	48.499.450	100	62.874.200				
2.16.0 1.2.02	Administrasi Kemangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan keuangan daerah yang dibuat dalam satu tahun, (Satuan: Dokumen)	70	14.624.085.000	14	3.749.160.783	14	4.730.999.500	0	4.379.907.883	92,58	4.592.915.400				
2.16.0 1.2.02. 01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangan setiap bulan, (Satuan: Pegawai)	29	14.427.085.000	23	3.706.148.883	30	4.683.999.700	30	4.332.907.900	92,50	4.505.019.600				
2.16.0 1.2.02. 05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun, (Satuan: dokumen)	3	76.000.000	1	11.001.900	1	33.999.900	1	33.999.900	100	13.000.000				
2.16.0 1.2.02. 07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran, (Satuan: dokumen)	39	121.000.000	13	32.010.000	13	38.529.345	13	38.529.345	100	74.895.800				

Kode	Sasaran/Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kejatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kejatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra PD (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja s.d Thn 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program PD thn 2022				Target Renja PD Thn 2023		Perkiraan Realisasi renstra PD s/d Thn berjalan		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
2.16.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis pakaian dinas/ pakaian khusus hari-hari tertentu berserta kelengkapannya yang disediakan, (Satuan: jenis)	5	164.000.000	1	0,00	1,00	38.529.345	1	38.529.345	100	1	41.025.600		
2.16.0 1.2.05 02.	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas / pakaian khusus hari-hari tertentu berserta kelengkapannya, (Satuan: stel)	60	164.000.000		0,00	60	38.529.345	60,00	38.529.345	100	1	41.025.600		
2.16.0 1.2.06 1.2.06 Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah yang disediakan, (Satuan: layanan)	45	2.187.600.000	9	190.610.950	9	229.891.870	0,00	228.072.059	99,21	9	276.137.910		
2.16.0 1.2.06 01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Perenerangan Bangunan Kantor	Jumlah lampu yang disediakan, (Satuan: buah)	200	20.000.000	30	2.385.000	30	2.385.000	30,00	2.385.000	100	4	6.001.000		
2.16.0 1.2.06 02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan, (Satuan: jenis)	52	900.000.000	9	74.639.000	5	88.821.920	5,00	88.821.920	100	2	79.088.610		
2.16.0 1.2.06 03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan, (Satuan: jenis)	5	62.000.000	16	2.466.000	16	2.693.400	16	2.693.400	100	7,00	5.184.500		
		Tersedianya bahan bakar untuk genset setiap bulannya, (Satuan: liter)													
		Tersedianya isi ulang tabung gas, (Satuan: Tabunggl)													
2.16.0 1.2.06 04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya jumlah makanan dan minuman rapat pegawai, (Satuan: dus)	1.600	16.000.000	120	900.000	150	1.500.000	150	1.500.000	100	0	0		

Kode	Sasaran/Urusan/ Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah Dan Program/Kejatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kejatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra PD (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja s.d Thn 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program PD thn 2022				Target Renja PD Thn 2023		Perkiraan Realisasi renstra PD s/d Thn berjalan		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
2.16.0 1.2.06. 05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan setiap bulan, (Satuan: paket)	24	39.600.000	12	9.213.000	12	14.266.500	11	14.266.500	100	12,00	14.266.300		
2.16.0 1.2.06. 06.	Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaaan koran lokal dan nasional, (Satuan: Eksempel)	26,4 00	92.000.000	5,280	24.868.000	5,280	26.958.000	5,280	25.138.189	93,25	16,00	26.958.000		
2.16.0 1.2.06. 07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah penyediaan jasa publikasi melalui surat kabar, (Satuan: publikasi)	24	116.000.000	11	47.999.500	12	50.010.200	12	50.010.200	100	12	43.120.600		
2.16.0 1.2.06. 08.	Facilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya jumlah makanan dan minuman tamu, (Satuan: dus)	2,90 0	29.000.000	120	1.200.000	150	1.500.000	150	1.500.000	100	12	3.000.000		
2.16.0 1.2.06. 09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah, (Satuan: Laporan)	480	900.000.000	28	26.940.450	60	51.756.850	60	51.756.850	100	60	98.518.900		
2.16.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah penujang urusan yang disediakan, (Satuan: Jenis)	10	2.196.000.000	2	6.996.000	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.16.0 1.2.07. 02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional yang disediakan, (Satuan: Unit)	6	1.625.000.000		0,00	0,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.16.0 1.2.07. 05.	Pengadaan Mebel	Jumlah mebebur yang disediakan, (Satuan: jenis)	23	571.000.000	2	6.996.000	0,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Kode	Sasaran/Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra PD (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja s.d Thn 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program PD thn 2022				Target Renja PD Thn 2023		Perkiraan Realisasi Renstra PD s/d Thn berjalan		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
2.16.0 1.2.08 02.	Penyediaan Jasa Kommunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa penunjang urusan yang disediakan, (Satuan: Jenis)	30	2.300.609.600	6	789.207.485	6	787.578.152	6	766.048.733	97,27	100	700.998.600		
2.16.0 1.2.08 04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa layanan telekomunikasi, air dan listrik selama 1 tahun, (Satuan: Tagihan)	72	780.000.000	36	355.634.078	36	349.348.352	36	328.933.310	94,16	36,00	340.998.600		
2.16.0 1.2.08 04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya jasa pelayanan umum kantor (pramu kantor/operator komputer) setiap bulannya, (Satuan: orang)	50	1.520.609.600	10	433.573.407	10	438.229.800	10	437.115.423	99,75	24,00	360.000.000		
		Tersedianya jumlah petugas jasa keamanan dan kebersihan kantor tiap bulan, (Satuan: orang)													
		Jumlah luasan kantor yang dibersihkan, (Satuan: M2)													
2.16.0 1.2.09 01.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis sarana dan prasarana yang dipelihara, (Satuan: Jenis)	40	1.602.150.000	8	95.472.500	5	104.522.000	5	98.195.900	93,95	5	209.756.500		
2.16.0 1.2.09 01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara, (Satuan: Unit)	16	350.000.000	15	76.390.000	16	77.380.000	14	76.750.000	99,19	19	118.527.000		

Kode	Sasaran/Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra PD (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja s.d Thn 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program PD thn 2022				Target dan Realisasi Kinerja Program PD thn 2023				
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Tingkat Realisasi 1 (%)	K	Rp	Realisasi s/d Thn 2023	Tingkat Realisasi Renstra (%)
2.16.0 1.2.09. 02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diurus perjennannya, (Satuan: Unit)	67	41.150.000	18	5.882.500	21	11.302.000	15	5.605.900	49,60	1,00	6.930.500		
2.16.0 1.2.09. 06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan AC, (Satuan: kali)	93	66.000.000	32	13.200.000	24	15.840.000	24	15.840.000	100	24,00	15.840.000		
		Jumlah pemeliharaan komputer, (Satuan: kali)													
		Jumlah pemeliharaan printer, (Satuan: kali)													
		Jumlah pemeliharaan kamera, (Satuan: kali)													
		Jumlah pemeliharaan scanner, (Satuan: kali)													
2.16.0 1.2.09. 09.	Pemeliharaan/Rehabetasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang diperbaiki, (Satuan: Paket)	3	1.145.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	68.459.000		
	Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik														
2.16.0 2.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah, (Satuan: Persen)	80	21.808.000.000	62,23	2.887.076.167	70	2.893.403.900	69,18	2.881.549.528	99,59	80	2.509.561.700		

Kode	Sasaran/Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra PD (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja s.d Tln 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program PD thn 2022				Target Renja PD Thn 2023		Perkiraan Realisasi renstra PD s/d Thn berjalan				
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Tingkat Realisasi i (%)	K	Rp	Realisasi capaian s/d Thn 2023	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)	K	Rp
2.16.0 2.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media informasi dan komunikasi publik yang digunakan, (Satuan: Media)	5	6.785.000.000	5,00	1.118.571.883	5	2.893.403.900	0,00	2.881.549.528	99,59	5	2.509.561.700				
2.16.0 2.2.01 01.	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah kebijakan teknis daerah (Perbup dan/ Keputusan Bupati dan/ Keputusan Kadis) bidang informasi dan komunikasi publik yang diterbitkan, (Satuan: Keputusan)	3	125.000.000	0,00	0,00	1	48.030.400	1	48.022.000	99,98	0,00	0,00				
2.16.0 2.2.01 02.	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi hasil kegiatan Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi (SAIK) Temu Bakohumas Tk Nasional sebagai bahan perumusan kebijakan teknis, (Satuan: Rekomendasi)	50	165.000.000	0,00	0,00	4	53.350.000	4	53.350.000	100	2,00	53.350.000				
		Jumlah layanan opini dan aspirasi publik melalui media cetak, (Satuan: Layanan)															
		Jumlah layanan opini dan aspirasi publik melalui media online, (Satuan: Layanan)															
		Jumlah layanan opini dan aspirasi publik melalui Kelompok Informasi Masyarakat, (Satuan: Layanan)															

Kode	Sasaran/Urusan/ Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra PD (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja s.d Tbn 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program PD tbn 2022				Target Renja PD Tbn 2023		Perkiraan Realisasi renstra PD s/d Tbn berjalan Realisasi s/d Tbn 2023		Tingkat Capaian Renstra (%)		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.16.0 2.2.01. 04.	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten informasi publik yang dibuat dan dipublikasikan, (Satuan: Konten)	455	350.000.000	365	148.251.517	365	150.635.800	365	150.448.954	99,38	12,00	150.635.500				
2.16.0 2.2.01. 05.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah eksemplar majalah yang diterbitkan, (Satuan: Konten) [Eksemplar] Jumlah media luar ruang yang dicetak, (Satuan: Lembar)	4.630	410.000.000	1.050	226.591.900	3.000	211.603.300	3.000	211.053.300	99,74	6	310.000.000				
2.16.0 2.2.01. 06.	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah PPIID yang mengikuti pelatihan/peningkatan kapasitas dan kemampuan pemurnai sertifikat untuk mengukur kualitas PPIID dalam menjalankan tugas dan fungsinya, (Satuan: orang PPIID)	170	1.325.000.000	12	520.244.310	109	616.894.700	109	616.614.894	99,95	10,00	566.392.300				
		Jumlah penyalangan informasi melalui penerbitan film, (Satuan: Kali)	12														
		Jumlah penyalangan informasi melalui wawar keliling, (Satuan: Kali)	46														
		Jumlah terpublikasikannya program-program pembangunan dan hasil-hasil di media TV, (Satuan: Publikasi)	16														

Kode	Sasaran/Urusan/ Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra PD (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja s.d Tthn 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program PD tthn 2022				Target Renja PD Tthn 2023		Pertkiraan Realisasi renstra PD s/d Tthn berjalan			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Jumlah terpublikasikannya program-program pembangunan dan hasil-hasil di media lain, (Satuan: Publikasi)	130,00													
		Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan, (Satuan: layanan)	12,00													
2.16.0 2.2.01. 07.	Layanan Hubungan Media	Jumlah diseminasi informasi melalui media cetak, (Satuan: Terbit) Jumlah diseminasi informasi melalui media radio, (Satuan: Tayang) Jumlah diseminasi informasi melalui media TV, (Satuan: Tayang)	229	2.250.000.000	12	1.277.269.800	191	1.220.935.900	191	1.220.935.900	100	16,00	1.057.833.300			
2.16.0 2.2.01. 10.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan/bimtek bidang komunikasi dan informasi, (Satuan: Orang) Jumlah peserta yang memiliki inovasi dalam webstinya dan mengikuti ajang Diskominfo Awards, (Satuan: Orang)	650	660.000.000	30	158.790.800	30	228.603.800	30	219.584.800	96,05	00	000			

Kode	Sasaran/Urusan/ Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra PD (Abstr Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja s.d Tmn 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program PD tln 2022				Target Renja PD Tln 2023		Portkiran Realisasi renstra PD s/d Tln bejalan Realisasi s/d Tmn 2023		Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Tingkat Realisasi 1 (%)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.16.0 2.2.01. 11.	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah wartawan yang menjadi peserta uji kompetensi wartawan dan mendapat sertifikat, (Satuan: orang)	15	800.000.000,00	3	464.828.817	12	253.665.000	12	253.621.680	99,98	5	312.327.900				
2.16.0 2.2.01. 12.	Penyenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Cirebon, (Satuan: Kali)	11	700.000.000	1	119.059.960	1	109.685.000	1	107.918.000	98,39	10	59.022.700				
2.16.0 3.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan pengelolaan aplikasi informatika, (Satuan: Persen - Non Kumulatif Meningkat)	94	249.107.800.000	92	4.022.118.007	88	4.369.786.724	88	4.362.712.801	99,84	95	3.676.329.301				
2.16.0 3.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo, (Satuan: Perangkat daerah)	365	13.800.800.000	71	709.304.588	71	2.905.521.904	0,00	2.902.253.120	99,88	71	2.734.363.856				
		Jumlah domain utama yang diperpanjang layannya, (Satuan: Domain)															

Kode	Sasaran/Urusan/ Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra PD (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja s.d Tmn 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program PD tln 2022				Target Renja PD Tln 2023		Pertkiraan Realisasi renstra PD s/d Tln berjalan		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
2.16.0 3.2.01. 02.	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah domain utama yang diperpanjang layannya, (Satuan: Domain)	2,00	168.000.000	1,00	40.887.716	1,00	19.800.000	1	19.800.000	100	000	000		
		Dilaksanakannya koordinasi dengan perangkat daerah lain lintas sektor dalam rangka pelayanan berbasis elektronik, (Satuan: Kali)	60												
2.16.0 3.2.01. 03.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas, (Satuan: Perangkat daerah)	73	13.632.800.000	73,00	2.854.700.596	71,00	2.885.721.904	71,00	2.882.453.120	99,89	2,00	2.734.363.856		
		Terperluhnya pemeliharaan jaringan TIK fiber optik yang difasilitasi Dinas Kominfo, (Satuan: Bulan)	15		3,00		12,00		12,00						
		Terperluhnya pemeliharaan perangkat keras router wireless yang difasilitasi Dinas Kominfo, (Satuan: Bulan)	15		2,00		12,00		12,00						
		Pengembangan infrastruktur jaringan TIK (Live Streaming fiber optik), (Satuan: Unit)	75				55,00		0,00						
		Pengembangan infrastruktur jaringan TIK (WAN), (Satuan: Unit)	70				50,00		50,00						

Kode	Sasaran/Urusan/ Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra PD (Abstr Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja s.d Tmn 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program PD tln 2022					Target Renja PD Tln 2023		Pertiruan Realisasi renstra PD s/d Tln berjalan		Realisasi capaian s/d Tln 2023		Tingkat Realisasi Renstra (%)		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Jumlah titik hotspot area publik yang dibangun, (Satuan: Titik)	15,0 0				0,00			0,00										
		Pengendalian Bandwidth dan monitoring jaringan TIK (Belanja sewa fiber optik), (Satuan: Titik)	412, 00				0,00			0,00										
2.16.0 3.2.02	Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan publik yang diseenggarakan secara online dan terintegrasi, (Satuan: layanan)	9,00	19.050.000.000	9,00	261.567.109	9,00	1.464.264.820	0,00	1.460.459.681	99,74	9	941.965.445							
2.16.0 3.2.02. 01.	Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi yang terbit dalam mendukung Implementasi e- government, (Satuan: Dokumen)	3,00	650.000.000	1	125.214.800	4	119.024.300	4	119.024.300	100	3	160.104.500							
		Jumlah dokumen perencanaan e- government, (Satuan: Dokumen)	2,00																	
2.16.0 3.2.02. 03.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terpeñtuhnya pemeliharaan NOC yang difasilitasi Dinas Kominfo, (Satuan: Bulan)	15	9.600.000.000	3	353.487.598	12	716.442.220	12	714.981.110	99,80	2	317.113.845							
		Jumlah pengelolaan suku cadang NOC, (Satuan: Unit)	75				33			33										
		Jumlah perangkat daerah yang menggunakan dan menyimpan data di pusat data pemerintah, (Satuan: Perangkat Daerah)	73				71			71										
		Pengembangan Disaster Recovery Center (DRC), (Satuan: DRC)	1				0,00			0,00										

Kode	Sasaran/Urusan/ Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra PD (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja s.d Thn 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program PD thn 2022				Target Renja PD Thn 2023		Perkiraan Realisasi Renstra PD s/d Thn berjalan		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Tingkat Realisasi (%)
2.16.0 3.2.02. 04.	Penyenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah aplikasi yang dikembangkan dan dipelihara dalam meningkatkan komunikasi berbasis elektronik Pemerintah Daerah. (Satuan: Aplikasi)	6	600.000.000	1	74.297.200	1,00	67.116.450	1,00	67.112.130	99,99	00	00		
2.16.0 3.2.02. 06.	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Tersedianya sistem informasi elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah, (Satuan: Sistem informasi)	2	510.000.000	1	64.683.280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	25.146.900		
		Jumlah promosi dan sosialisasi Smart City berbasis elektronik, (Satuan: Kegiatan)	3												
		Jumlah monitoring dan evaluasi SP3B, (Satuan: Kegiatan)	1												
2.16.0 3.2.02. 07.	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi yang dibangun dan dikembangkan dalam mendukung pemerintahan berbasis elektronik, (Satuan: Aplikasi)	7	800.000.000	2,00	159.539.000	2,00	202.748.000	2,00	202.743.680	100	3	232.196.600		
2.16.0 3.2.02. 08.	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Tersedianya fasilitasi operasional Cirebon Katon Respon 112, (Satuan: Kegiatan)	3	3.000.000.000	1	183.969.314	3	295.666.800	3	293.469.553	99,26	9	147.403.600		

Kode	Sasaran/Urusan/ Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra PD (Akhir Periode RJUMD)		Realisasi Capaian Kinerja s.d Tmn 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program PD thn 2022				Target Renja PD Thn 2023		Perkiraan Realisasi renstra PD s/d Thn berjalan		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
2.16.0 3.2.02. 09.	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah titik pembangunan CC/TV, videotron, video conference dan kelengkapannya, (Satuan: Lokasi)	140	270.000.000,00	70	98.540.186	60	63.267.050	51	63.128.908	99,78	1	60.000.000		
		Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasi kan inovasi yang mendukung smart city, (Satuan: Perangkat Daerah)	3												
2.16.0 3.2.02. 10.	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah remaja dan dewasa (pelajar/masyarak at) yang dilatih dengan keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi, (Satuan: Orang)	140	520.000.000,00	60	85.396.180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Jumlah ASN, PPPk, dan Non PNS pengelola TIK yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikasi, (Satuan: Orang)	460												
2.16.0 3.2.02. 11.	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah aparatur yang mendapat sertifikat kompetensi GCIO, (Satuan: Orang)	15	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Kode	Sasaran/Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra PD (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja s.d Thn 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program PD thn 2022				Target Renja PD Thn 2023		Perkiraan Realisasi renstra PD s/d Thn berjalan		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Tingkat Realisasi 1 (%)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK														
	Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah														
2.20.0	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, (Satuan: Persen - Non Kumulatif Meningkat)	100	10.352.000.000	57	594.280.692	60	319.609.650	60	318.933.311	99,79	80	606.160.100		
2.20.0	2.20.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah, (Satuan: perangkat daerah)	31	2.070.000.000	32	429.282.560	31	319.609.650	31	318.933.311	99,79	31	606.160.100		
2.20.0	2.20.01.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	2	190.000.000	1	55.473.800	1	17.744.150	1	17.622.300	99,31	2	40.000.000		
2.20.0	2.20.01.03.	Membangun Metadata Statistik Sektoral	1	240.000.000	1	56.913.150	1	14.700.000	1	14.700.000	100	00	00		
2.20.0	2.20.01.05.	Pengembangan Infrastruktur	1	540.000.000	0	166.965.614	0	114.560.011	0,00	114.560.011	99,99	00	00		

Kode	Sasaran/Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra PD (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja s.d Thn 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program PD thn 2022				Target Renja PD Thn 2023		Perkiraan Realisasi renstra PD s/d Thn berjalan		Target Capaian Renstra (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.20.0 2.2.01. 06.	Penyelenggaraan Ortorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah elemen data pada SIPD yang sudah terisi oleh perangkat daerah, (Satuan: data)	1,66 5		1,560		1,457		1,929		1,72.051.000	99,69	1,00	566.160.100		
2.21. 2.21.0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Terwujudnya penyelenggaraan persandian															
2.21.0 2.2.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah, (Satuan: Persen - Non Kumulatif Meningkat)	57,2	8.365.000.000	56,60	238.790.261	56,80	195.884.050	8,45	195.875.410	99,99	60	95.805.000			
2.21.0 2.2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi dan atau aplikasi persandian, (Satuan: sistem elektronik)	1	1.550.000.000	1	77.323.360	1	175.146.200	1	175.137.560	99,99	0,00	0,00			
2.21.0 2.2.01. 02.	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelembaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan teknis persandian dalam pengamanan informasi, (Satuan: Dokumen)	3	50.000.000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Jumlah sarana prasarana operasional pengamanan informasi sesuai	3	200.000.000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Kode	Sasaran/Urusan/ Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra PD (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja s.d Tln 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program PD tln 2022				Target Renja PD Tln 2023		Perkiraan Realisasi renstra PD s/d Tln berjalan							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.21.0 2.2.01. 03.	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah aplikasi yang diumumkan, (Satuan: Aplikasi)	30	600.000.000		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
		Jumlah managemen akses dan identitas yang dikelola, (Satuan: Dokumen)	6																	
		Jumlah anti malware yang disediakan, (Satuan: Paket)	3																	
2.21.0 2.2.01. 04.	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi/bimtek dan morev sertifikasi elektronik, (Satuan: Kegiatan)	40	800.000.000	1	180.988.253	13	175.146.200	13	175.137.560	99,99	0,00		0,00						
		Jumlah pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi, (Satuan: Kali)	440																	
2.21.0 2.2.02	Penetapan Pola Hubungan Kommunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah titik yang diumumkan pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Kommunikasi Sandi (PHKS), (Satuan: Titik)	31	815.000.000	31	57.802.007	31	20.737.850	31	20.737.850	100	31	95.805.000,00							
2.21.0 2.2.02. 01.	Operasionalisasi Jaring Kommunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terperuhnya pemeliharaan jaringan sandi setiap bulannya, (Satuan: Bulan)	39	815.000.000	3	57.808.007	1	20.737.850	1	20.737.850	100	12	95.805.000,00							
		Jumlah sosialisasi dalam menyenggarakan jaring komunikasi sandi, (Satuan: Kegiatan)	8																	

Berdasarkan tabel evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian Rencana Strategis sampai dengan tahun 2022, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

- Capaian kinerja target dan realisasi 5 (lima) Program pada Renja Tahun 2022, yaitu meliputi:
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 2. Program Informasi Dan Komunikasi Publik
 3. Program Aplikasi Informatika
 4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
- Realisasi keuangan tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 13.362.270.676,- atau 97,09% dari target Rp. 13.762.651.041,-, sedangkan sisa anggaran yang tidak diserap sebesar Rp. 400.380.365,-.
- Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Faktor-faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

No.	Program	Faktor Penghambat	Implikasi
1.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya perencanaan yang matang - Sumber daya teknis terbatas - Kurangnya keterampilan atau kapasitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Formulasi Indikator kinerja kunci belum dipahami sepenuhnya - Pelayanan informasi dan komunikasi publik belum efektif dan efisien
2.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya sumber daya teknis persandian sehingga urusan persandian belum dapat dipahami sepenuhnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Urusan persandian belum berjalan optimal - Indikator terhadap indeks KAMI belum sepenuhnya dipahami

- Kinerja program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Faktor-faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

No.	Program	Faktor Pendukung Keberhasilan	Implikasi
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Menejemen Pelaksanaan Kegiatan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Kepuasan terhadap kesekretariatan meningkat - Pelayanan kesekretariatan berjalan dengan baik
2.	Program Aplikasi Informatika	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Memiliki manajemen pengelolaan kegiatan yang bagus. Adanya komitmen dari pengampu kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya aspek teknologi informasi dan komunikasi - Meningkatnya sistem pemerintahan berbasis elektronik
3.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Menejemen Pelaksanaan Kegiatan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan statistik sektoral berjalan optimal - Meningkatnya layanan statistik sektoral dalam mewujudkan satu data Kabupaten Cirebon

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel diatas, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2024 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan menejemen pelaksanaan kegiatan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Proses perencanaan kegiatan yang matang merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Karena data perencanaan merupakan dokumen untuk melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi, apakah pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai dengan target rencana atau belum, baik dari dimensi waktu, biaya, target kinerja maupun kaidah norma aturan yang berlaku. Dalam melaksanakan kegiatan dari masing-masing

- penanggung jawab harus secara intensif berkomunikasi secara sinergis, agar apa yang dilaksanakan sesuai dengan rencana.
2. Pelaksanaan kegiatan memperhatikan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja yang telah dibuat sebelumnya. Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja merupakan bagian dari dokumen perencanaan yang sudah dituangkan dalam aplikasi ESAKIP. Dokumen ini menyangkut *schedul* waktu pelaksanaan, dari persiapan, pelaksanaan hingga pelaporan, baik dari segi target kinerja kegiatan sampai dengan target realisasi keuangan.
 3. Memberikan stimulan untuk meningkatkan kinerja instansi melalui pemberian reward kepada pengampu program/kegiatan/sub kegiatan yang berhasil memenuhi target kinerja yang ditetapkan. Dalam proses pelaksanaan pekerjaan sering kali dijumpai hambatan maupun rintangan, baik yang bersifat teknis dan non teknis. Untuk itu setiap penanggung jawab kegiatan harus selalu berkomunikasi secara intensif kepada semua *stakeholder*, agar dapat mendeteksi permasalahan lebih dini. Akhir dari pelaksanaan pekerjaan yang kita inginkan adalah keberhasilan, kelancaran dan capaian target kinerja yang tinggi. Untuk itu keberhasilan semua program/kegiatan/sub kegiatan tersebut akan berimbang pada prestasi kinerja perangkat daerah. Disamping itu secara individual bagi pelaksana kegiatan yang berprestasi akan mendapatkan *reward*/apresiasi dari pimpinan perangkat daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Diskominfo Kabupaten Cirebon.

Pada tahun 2022 capaian kinerja Diskominfo Kabupaten Cirebon sesuai dengan target yang sudah terakomodir pada RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Indikator Kinerja Utama											
1	Indeks Domain SPBE			2.57 poin	2.67 poin	2.77 poin	2.87 poin	2.57 poin	2.00 poin	2.77 poin	2.87 poin	
2	Indeks Keterbukaan Informasi Publik			56.63 poin	40 poin	45 poin	50 poin	31.87 poin	76.69 poin	45 poin	50 poin	
3	Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral			40 persen	52.50 persen	65 persen	77.50 persen	58.05 persen	57.50 persen	65 persen	77.5 persen	
4	Indeks Keamanan Informasi			II level	II level	II level	II level	II level	II level	II level	II level	
5	Persentase pengaduan keberadaan menara telkomunikasi			10 persen	-	-	-	0.6 persen	-	-	-	Tahun 2021 s/d 2024 tidak digunakan
6	Indeks Kepuasan Masyarakat			3.55 poin	3.57 poin	3.59 poin	3.61 poin	3.558 poin	3.572 poin	3.59 poin	3.61 poin	
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
	IKK Outcome											
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		√	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		√	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		√	60 persen	65 persen	70 persen	75 persen	80 persen	100 persen	75 persen	80 persen	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasiona 1	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis	
				Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	IKK Output												
1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo		√	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo		√	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya)		√	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	
4	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara		√	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
5	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar		√	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
6	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan		√	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasiona 1	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik		√	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
8	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik		√	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
9	Persentase system elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		√	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
10	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan layanan pemerintah		√	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
11	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah		√	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
12	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah		√	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
13	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)		√	11 persen	12 persen	13 persen	15 persen	16 persen	17 persen	17 persen	18 persen	
14	Persentase data yang dapat berbagi pakai		√	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
15	Persentase perangkat daerah yang Mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city		√	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasiona 1	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
16	Persentase ASN pengelola TIK yang Tertsertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo		√	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
17	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi egovernment		√	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
18	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah Kab/Kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kab/Kota		√	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
19	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kab/Kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)		√	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
20	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan		√	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
URUSAN STATISTIK												
IKK Outcome												
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		√	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		√	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasiona 1	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	IKK Output										
1	Tersedianya buku profil daerah		√	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan		√	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan		√	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS		√	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS		√	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral		√	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
7	Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral		√	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	URUSAN PERSANDIAN										
	IKK Outcome										
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah		√	5 persen	6 persen	7 persen	8 persen	5 persen	6 persen	7 persen	8 persen
1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal disbanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan		√	50 persen	55 persen	60 persen	65 persen	50 persen	55 persen	60 persen	65 persen
2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah		√	50 persen	55 persen	60 persen	65 persen	50 persen	55 persen	60 persen	65 persen
3	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah		√	50 persen	55 persen	60 persen	65 persen	50 persen	55 persen	60 persen	65 persen

No	Indikator	SPM/ Standar Nasiona 1		Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi		√	9.5 persen	12 persen	15 persen	18 persen	9.5 persen	12 persen	15 persen	18 persen	
	Indikator SDGs											
I	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan Global											
1	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)			45 orang	210 orang	390 orang	400 orang	410 orang	210 orang	390 orang	400 orang	
II	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020											
1	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
2	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasiona 1	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis	
			Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
III	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional											
1	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.		87 badan publik	87 badan publik	87 badan publik	87 badan publik	87 badan publik	87 badan publik	76 badan publik	483 badan publik		
2	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen		
3	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.		76 PPID	76 PPID	76 PPID	76 PPID	76 PPID	76 PPID	76 PPID	76 PPID		
4	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
5	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		

No	Indikator	SPM/ Standar Nasiona 1	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
IV	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas utk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang & negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu & dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis & karakteristik lainnya yg relevan dgn konteks nasional										
1	Proporsi individu yang menggunakan internet		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

➤ **Indikator Kinerja Kunci**

Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika mengampu 3 (tiga) urusan, yaitu urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian. Dan masing-masing urusan terdiri dari beberapa indikator kinerja kunci sebagai berikut:

Urusan Komunikasi dan Informatika

- Terdiri dari 3 IKK outcome dan 20 IKK output
- Capaian IKK outcome memenuhi target yang ditetapkan
- Hampir semua IKK output memenuhi target yang ditentukan, namun terdapat IKK output yang belum dapat disajikan capaian kerjanya karena minimnya sumber data yang diperoleh
- Sebagian besar IKK outcome/output urusan komunikasi dan informatika belum dipahami oleh para pemangku sehingga data yang diperoleh tidak semuanya dapat dijelaskan dengan rinci.

Urusan Statistik

- Terdiri dari 2 IKK outcome dan 7 IKK output
- Capaian IKK outcome memenuhi target yang ditetapkan
- Hampir semua IKK output memenuhi target yang ditentukan, namun terdapat IKK output yang belum dapat disajikan capaian kinerjanya karena minimnya sumber data yang diperoleh.
- Sebagian besar IKK outcome/output urusan statistik belum dipahami oleh para pemangku sehingga data yang diperoleh tidak semuanya dapat dijelaskan dengan rinci.

Urusan Persandian

- Terdiri dari 1 IKK outcome dan 4 IKK output
- Capaian IKK outcome memenuhi target yang ditetapkan
- Sebagian besar IKK outcome/output urusan persandian belum dipahami oleh para pemangku sehingga data yang diperoleh tidak semuanya dapat dijelaskan dengan rinci.

➤ SDGs

- Berdasarkan data SDGs diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan 4 target dan 9 indikator. Pencapaian indikator tujuan SDGs pada tahun 2022 menunjukkan terdapat indikator yang memenuhi target yang ditentukan. Sementara beberapa indikator lainnya belum dapat ditentukan disebabkan minimnya sumber data yang diperoleh;
- Sebagian besar indikator SDGs belum dipahami oleh para pemangku sehingga data yang diperoleh tidak semuanya dapat dijelaskan dengan rinci.

2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Kabupaten Cirebon. Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut maka diterbitkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas

Komunikasi dan Informatika dengan tugas pokok terdapat 3 (tiga) tugas pokok yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi informatika, statistik dan persandian. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu dinas yang ada di Kabupaten Cirebon yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi sangat strategis dalam mendukung pelayanan komunikasi dan informasi, utamanya dalam mewujudkan pelayanan berbasis teknologi informasi. Hal ini tentunya juga harus didukung dengan infrastruktur yang memadai. Sehingga harapan pada lima tahun yang akan datang akan berpengaruh pada kualitas pelayanan berbasis *e-Government*. Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan adanya akses informasi yang cepat, mudah dan akurat, belum diimbangi dengan pemenuhan sarana prasarana yang memadai. Selain itu Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan salah satu bentuk pelayanan publik dengan tujuan agar masyarakat dapat dilayani dalam waktu relatif cepat dan transparan. Dalam implementasinya, terdapat kendala yaitu beberapa SIM yang seharusnya bisa diintegrasikan tetapi masih belum terintegrasi dengan baik.

Dalam kaitannya dengan urusan statistik, kurang rapinya pengelolaan data juga menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan. Data berada di semua Perangkat Daerah dan tersebar di berbagai bidang namun apabila diperlukan khususnya terkait dengan perencanaan dan pengambilan keputusan, ternyata data yang dimaksud tidak akurat dan tidak valid. Hal ini tentunya perlu dilakukan pembenahan tata kelola data secara sistematis dan terintegrasi.

Pengamanan informasi menjadi salah satu aspek yang mendapat prioritas pada urusan persandian. Paradigma sandi melebar dan meluas dalam hubungannya dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Kebutuhan terhadap SDM yang memahami pengamanan informasi secara khusus mutlak diperlukan, selain itu kesadaran Perangkat Daerah dari unsur pimpinan sampai dengan staf terkait pengamanan informasi perlu terus ditumbuhkan.

Untuk memudahkan dalam memberikan gambaran tentang isu strategis yang dikaitkan dengan telaah terhadap visi, misi dan program kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan, maka dapat digambarkan kerangka permasalahan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tabel 2.5

Pemetaan Permasalahan Pelayanan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik belum optimal	1. Pemenuhan variabel pada domain tata kelola SPBE masih belum optimal	1. Minimnya penguasaan IT dikalangan PNS 2. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung perkembangan IT
2.	Pelayanan Informasi dan komunikasi publik belum optimal	1. Penyediaan dan diseminasi informasi publik belum optimal	1. Kurangnya sarana dan komunikasi publik dan diseminasi informasi dalam rangka terwujudnya keterbukaan informasi publik
3.	Ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral belum optimal	1. Ketersediaan data sektoral belum optimal	1. Belum optimalnya integrasi data
		2. Pemanfaatan data sektoral belum optimal	1. Masih terbatasnya pengelola data sektoral dalam mendukung terwujudnya <i>open government</i> 2. Masih rendahnya akses publik terhadap data sektoral dalam mendukung terwujudnya <i>open government</i>
4	Pengamanan informasi pada perangkat daerah belum optimal	1. Tingginya resiko dalam kerawanan keamanan informasi	1. Belum adanya peningkatan kapasitas pengelola persandian dalam rangka peningkatan <i>Cyber Security</i> 2. Kurangnya fasilitas sarana pendukung keamanan informasi 3. Belum optimalnya pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Diskominfo adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam kinerja dan pelayanan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pada dua tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi dan informatika Kabupaten Cirebon jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Diskominfo Kabupaten Cirebon yaitu :

1. Belum optimalnya fasilitas teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik;
2. Masih rendahnya diseminasi informasi mengenai kebijakan dan hasil pembangunan daerah dalam mendukung keterbukaan informasi publik;
3. Masih rendahnya integrasi dan kualitas data statistik sektoral;
4. Kurangnya pemahaman serta kesadaran keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah.

Dari uraian diatas maka dapat dijabarkan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

Tabel 2.6
Peluang dan Tantangan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2024

No	Isu Strategis	Tantangan	Peluang
1	Belum optimalnya fasilitas teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya infrastruktur yang memadai - Kurangnya SDM yang terlatih - Kompleksitas sistem - Ketergantungan pada vendor tertentu - Ketidaksetaraan akses 	<ul style="list-style-type: none"> - Modernisasi infrastruktur - Pelatihan dan pengembangan SDM - Mengurangi kesenjangan digital - Sederhana sistem dan antarmuka pengguna - Peningkatan transparansi dan akuntabilitas
2	Masih rendahnya diseminasi informasi mengenai kebijakan dan hasil pembangunan daerah dalam mendukung keterbukaan informasi publik	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kesadaran masyarakat - Keterbatasan akses teknologi - Ketidacukupan sumber daya - Kurangnya platform komunikasi - Rendahnya keterampilan komunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan transparansi pemerintah - Pemanfaatn teknologi informasi - Partnership dengan media - Meningkatkan keterlibatan masyarakat - Peningkatan literasi digital - Penggunaan alat visual dan infografis
3	Masih rendahnya integrasi dan kualitas data statistik sektoral;	<ul style="list-style-type: none"> - Ketidaklengkapan data - Ketidakakuratan data - Duplikasi data - Tidak terpenuhinya kebutuhan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kolaborasi antar sektor - Pengembangan infrastruktur data terpadu - Perbaikan metodologi pengumpulan data - Peningkatan responsivitas
4	Kurangnya pemahaman serta kesadaran keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Pelanggaran keamanan data - Penurunan integritas data - Ancaman malware - Kerentanan sistem - Tidak memadainya persandian 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan edukasi dan pelatihan - Pengembangan kebijakan keamanan informasi - Pemanfaatan teknologi persandian yang lebih baik - Inovasi dalam pendidikan teknologi - Kemitraan publik-privat

Adapun rekomendasi dan catatan penting dalam perumusan program kegiatan prioritas tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.7
Rekomendasi dan Catatan Penting
dalam Perumusan Program Kegiatan Tahun 2024

No	Prioritas Perangkat Daerah	Target	Lokasi	Program/Kegiatan Sub. Kegiatan	Pagu Dana	Keterangan
1	Integrasi Aplikasi	1 paket	Kabupaten Cirebon	Program Aplikasi Informatika Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan berbasis Elektronik	350.000.000	Integrasi aplikasi super apps
2	Pembangunan Backbone	1 paket	Kabupaten Cirebon	Program Aplikasi Informatika Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domian di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	250.229.000	Penguatan layanan publik
3	MPLS	1 paket	Kabupaten Cirebon	Program Aplikasi Informatika Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domian di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	900.000.000	Dukungan layanan kependudukan
4	Virtual meeting	1 paket	Kabupaten Cirebon	Program Aplikasi Informatika Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	390.000.000	Dukungan kegiatan musrenbang
5	CCTV	1 paket	Kabupaten Cirebon	Program Aplikasi Informatika Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	420.000.000	Dukungan Cirebon AMAN
6	Videotron	1 paket	Kabupaten Cirebon	Program Aplikasi Informatika Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1.000.000.000	Dukungan penataan Taman PKK Sumber
7	Penguatan Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon	1 paket	Kabupaten Cirebon	Program Informasi dan Komunikasi Publik Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	279.000.000	Dukungan Keterbukaan Informasi Publik

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah tahap kritis dalam proses perencanaan pembangunan suatu daerah. Tujuan dari review ini adalah untuk memastikan bahwa RKPD telah dirancang dengan baik, sesuai dengan visi dan misi daerah, serta mampu mengatasi tantangan dan peluang yang ada.

Dari hasil pencermatan internal dan tim verivikator Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, ada perbedaan antara jumlah anggaran dan output sub kegiatan yang diusulkan pada rancangan awal renja dengan jumlah anggaran dan ouput sub kegiatan pada rancangan akhir RKPD Tahun 2024. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pada rancangan akhir renja tahun 2024 disampaikan sebagai berikut :

- a. Menindaklanjuti hasil rekomendasi yang mencakup penambahan, pengurangan atau penyesuaian program dan kegiatan dalam rencana kerja;
- b. Memperhatikan hasil capaian kinerja dan keuangan tahun sebelumnya agar dapat lebih efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran dan sumber daya lainnya;
- c. Menindaklanjuti prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Cirebon atas dasar usulan dari Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.

Adapun hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah Tahun 2024
Kabupaten Cirebon

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
0,	NON URUSAN				9.752.800.000	NON URUSAN				6.286.894.760		
0.00	NON BIDANG URUSAN				9.752.800.000	NON BIDANG URUSAN				6.286.894.760		
0.00 .01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 PERSEN	1.742.800.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 PERSEN	714.887.280		
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 PERSEN	2.045.000.000			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 PERSEN	903.120.080		
			Terpenuhinya peningkatan disiplin aparaturnya dalam berpakaian dinas	100 PERSEN	50.000.000			Terpenuhinya peningkatan disiplin aparaturnya dalam berpakaian dinas	0 PERSEN	-		
			Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100 PERSEN	5.705.000.000			Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100 PERSEN	4.435.691.200		
			Persentase dokumen perencanaan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 PERSEN	210.000.000			Persentase dokumen perencanaan yang tepat waktu dan sesuai peraturan PerUU	100 PERSEN	233.196.200		
0.00 .01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang dibuat dalam satu tahun	17 Dokumen	210.000.000	Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang dibuat dalam satu tahun	17 Dokumen	233.196.200		
0.00. 01.2. 01.0 1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	115.658.700		
0.00. 01.2. 01.0 6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	110.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	117.537.500		

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
0.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen dan laporan keuangan daerah yang dibuat dalam satu tahun	14 Dokumen	5.705.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen dan laporan keuangan daerah yang dibuat	14 Dokumen	4.435.691.200	
01.02.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	5.545.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	4.279.551.000	
01.02.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	16.275.000	
01.02.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/ Semesteran/ Triwulanan/ Semes teran SKPD	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan/ Semesteran SKPD	13 Laporan	110.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13 Laporan	139.865.200	
01.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah jenis pakaian dinas/ pakaian khusus beserta kelengkapannya yang disediakan	1 Jenis	50.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah jenis pakaian dinas/ pakaian khusus hari-hari tertentu beserta kelengkapannya yang disediakan	1 Jenis	0	
01.02.05.05	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	50.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0 Paket	0	
01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang disediakan	9 Layanan	842.800.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	9 Layanan	305.187.680	
01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	20.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	8.266.800	
01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket	400.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket	92.083.380	
01.02.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	40.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	5.875.400	
01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	10.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	
01.02.06.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket	16.008.200	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	
0.00.01.2.06.0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	16 Dokumen	40.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	16 Dokumen	28.675.800	
0.00.01.2.06.0	Penyediaan Bahan/Material	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	52.800.000	Penyediaan Bahan/Material	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	50.918.100	
0.00.01.2.06.0	Fasilitas Kunjungan Tamu	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.000.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	3.000.000	
0.00.01.2.06.0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220 Laporan	250.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100.360.000	
0.00.01.2.07.0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah penunjang urusan yang disediakan	2 Jenis	1.100.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah penunjang urusan yang disediakan	2 Jenis	107.035.080	
0.00.01.2.07.0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	1.000.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		0	
0.00.01.2.07.0	Pengadaan Mebel	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	100.000.000	Pengadaan Mebel	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	107.035.080	
0.00.01.2.08.0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah jasa penunjang urusan yang disediakan	6 Jenis	900.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah jasa penunjang urusan yang disediakan	6 Jenis	769.699.600	
0.00.01.2.08.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	500.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	409.699.600	
0.00.01.2.08.0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	400.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	360.000.000	
0.00.01.2.09.0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah jenis sarana dan prasarana yang dipelihara	8 Jenis	945.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah jenis sarana dan prasarana yang dipelihara	8 Jenis	436.085.000	
0.00.01.2.09.0	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kendaraan dan Pajak atau Kendaraan Dinas Jabatan	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16 Unit	150.000.000	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kendaraan dan Pajak atau Kendaraan Dinas Jabatan	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit	107.792.000	

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
0.00.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	15.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	6.945.000
0.00.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	30.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	29.200.000
0.00.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	750.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	292.148.000
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				31.523.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9.704.722.584
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				24.733.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				8.783.806.384
2.16.02.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				6.435.000.000	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				2.410.615.400
2.16.02.01.1.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				6.435.000.000	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	80 Person	2.410.615.400
2.16.02.01.2.	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Komunikasi Publik	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah media informasi dan komunikasi publik yang digunakan	5 Media	6.435.000.000	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah media informasi dan komunikasi publik yang digunakan	5 Media	2.410.615.400
2.16.02.01.0.	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	3 Dokumen	350.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	0 Dokumen	0
2.16.02.02.	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik	12 Dokumen	265.000.000	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik	12 Dokumen	53.350.000
2.16.02.04.	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	400.000.000	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	146.304.800
2.16.02.05.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	14 Dokumen	410.000.000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	14 Dokumen	93.762.300

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian		Pagu Indikatif
2.16.02.2.01.06.	Pelayanan Informasi Publik	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	1.000.000.000	Pelayanan Informasi Publik	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	673.304.400	
2.16.02.2.01.07.	Layanan Hubungan Media	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Layanan Hubungan Media	36 Layanan	2.500.000.000	Layanan Hubungan Media	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Layanan Hubungan Media	36 Layanan	1.029.484.600	
2.16.02.2.01.10.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	400 Orang	510.000.000	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	0 Orang	0	
2.16.02.2.01.11.	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	12 Dokumen	500.000.000	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	12 Dokumen	324.939.300	
2.16.02.2.01.12.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Mitraan Komunitas	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Dokumen Mitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Program atau Kebijakan	12 Dokumen	500.000.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Mitraan Komunitas	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Dokumen Mitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	12 Dokumen	89.470.000	
2.16.03.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Cakupan pengelolaan aplikasi informatika	94 Persen	18.298.000.000	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Cakupan pengelolaan aplikasi informatika	94 Persen	6.373.190.984	
2.16.2.01.	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	71 Perangkat daerah	10.150.000.000	Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	71 Perangkat daerah	3.931.955.019	
			Jumlah domain utama yang diperpanjang layanannya	1 Domain				Jumlah domain utama yang diperpanjang layanannya	1 Domain		
2.16.03.2.01.02.	Penataaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Dokumen Penataaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten	1 Dokumen	150.000.000	Penataaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Dokumen Penataaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten	0 Dokumen	0	
2.16.03.2.01.03.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2 Unit	10.000.000.000	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2 Unit	3.931.955.019	
2.16.03.2.02.	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	9 layanan	8.148.000.000	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	9 layanan	2.441.235.965	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian		Pagu Indikatif
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	360.000.000	Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	195.942.300	
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	2 Unit	5.558.000.000	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	2 Unit	1.755.276.665	
2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintahan Daerah	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	250.000.000	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintahan Daerah	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	0	
2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	71 Perangkat Daerah	250.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	71 Perangkat Daerah	0	
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	5 Unit	650.000.000	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	5 Unit	430.017.000	
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	9 Layanan	360.000.000	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	0 Layanan	0	
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	12 Dokumen	400.000.000	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	12 Dokumen	60.000.000	
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	12 Dokumen	220.000.000	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	0 Dokumen	0	
2.16.03.2.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1 Dokumen	100.000.000	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	0 Dokumen	0	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian		Pagu Indikatif
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				3.890.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				791.012.200	
2.20.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase Organisasi Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	3.890.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase Organisasi Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	791.012.200	
2.20.02.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melaksanakan evaluasi pembangunan daerah	31 perangkat daerah	3.890.000.000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melaksanakan evaluasi pembangunan daerah	31 perangkat daerah	791.012.200	
2.20.02.01.1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	500.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	0 Dokumen	0	
2.20.02.01.3.	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	3 Dokumen	400.000.000	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	0 Dokumen	0	
2.20.02.01.5.	Pengembangan Infrastruktur	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Infrastruktur Statistik	2 Unit	300.615.000	Pengembangan Infrastruktur	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Infrastruktur Statistik	0 Unit	0	
2.20.02.01.6.	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	5 Dokumen	2.689.385.000	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	791.012.200	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				2.900.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				129.904.000	
2.21.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Tingkat keamanan informasi pemerintah	57,2 Persen	2.900.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Tingkat keamanan informasi pemerintah	57,2 Persen	129.904.000	
2.21.02.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi dan atau aplikasi persandian	1 sistem elektronik	2.050.000.000	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi dan atau aplikasi persandian	1 sistem elektronik	129.904.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	450.000.000	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0 Laporan	0	
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Laporan	800.000.000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	0 Laporan	0	
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	73 Perangkat Daerah	800.000.000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	13 Perangkat Daerah	129.904.000	
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah titik yang diamankan pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS)	31 Titik	850.000.000	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah titik yang diamankan pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS)	0 Titik	0	
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	73 Perangkat Daerah	850.000.000	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo Kab. Cirebon	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	0 Perangkat Daerah	0	
										15.991.617.344	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses perencanaan atau planning adalah bagian dari daur kegiatan manajemen yang terutama berhubungan dengan pengambilan keputusan (*decision making*) untuk masa depan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Salah satu proses atau perencanaan yang sering dilakukan dalam melakukan pembangunan adalah dengan menggunakan sistem pembangunan yang bersifat *Bottom-Up*. *Bottom-Up Planning* adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan bersama-sama dengan atasan menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan dan atasan juga berfungsi sebagai fasilitator. Dalam hal ini atasan merupakan pemerintah dan bawahan merupakan masyarakat, swasta serta pemangku kepentingan. Berikut usulan kecamatan melalui Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) sebagai berikut.

Tabel 2.9
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Cirebon

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Volume	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kec. Sumber	1 paket	Jumlah data statistik sektoral yang dihimpun	Rp. 18.600.000	Pemutakhiran data pembangunan Tingkat Kecamatan (PUSDATIN)
2	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kec. Dukupuntan g	1 paket	Jumlah data statistik sektoral yang dihimpun	Rp. 16.810.000	Pemutakhiran data pembangunan Tingkat Kecamatan (PUSDATIN)
3	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kec. Plumbon	1 paket	Jumlah data statistik sektoral yang dihimpun	Rp. 15.750.000	Pemutakhiran data pembangunan Tingkat Kecamatan (PUSDATIN)
4	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kec. Weru	1 paket	Jumlah data statistik sektoral yang dihimpun	Rp. 19.330.000	Pemutakhiran data pembangunan Tingkat Kecamatan (PUSDATIN)
5	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kec. Plered	1 paket	Jumlah data statistik sektoral yang dihimpun	Rp. 18.600.000	Pemutakhiran data pembangunan Tingkat Kecamatan (PUSDATIN)
6	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kec. Palimanan	1 paket	Jumlah data statistik sektoral yang dihimpun	Rp.17.340.000	Pemutakhiran data pembangunan Tingkat Kecamatan (PUSDATIN)

No	Sub Kegiatan	Lokasi	Volume	Indikator Kinerja	Volume	Alasan
7	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kec. Klangeran	1 paket	Jumlah data statistik sektoral yang dihimpun	Rp.19.330.000	Pemutakhiran data pembangunan Tingkat Kecamatan (PUSDATIN)
8	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kec. Depok	1 paket	Jumlah data statistik sektoral yang dihimpun	Rp. 17.340.000	Pemutakhiran data pembangunan Tingkat Kecamatan (PUSDATIN)
9	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kec. Gempol	1 paket	Jumlah data statistik sektoral yang dihimpun	Rp.19.860.000	Pemutakhiran data pembangunan Tingkat Kecamatan (PUSDATIN)
10	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kec. Jamblang	1 paket	Jumlah data statistik sektoral yang dihimpun	Rp. 19.860.000	Pemutakhiran data pembangunan Tingkat Kecamatan (PUSDATIN)
11	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kec. Arjawanngun	1 paket	Jumlah data statistik sektoral yang dihimpun	Rp. 17.795.000	Pemutakhiran data pembangunan Tingkat Kecamatan (PUSDATIN)
12	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kec. Panguragan	1 paket	Jumlah data statistik sektoral yang dihimpun	Rp. 19.330.000	Pemutakhiran data pembangunan Tingkat Kecamatan (PUSDATIN)
13	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kec. Susukan	1 paket	Jumlah data statistik sektoral yang dihimpun	Rp. 17.340.000	Pemutakhiran data pembangunan Tingkat Kecamatan (PUSDATIN)
14	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kec. Gegesik	1 paket	Jumlah data statistik sektoral yang dihimpun	Rp. 16.280.000	Pemutakhiran data pembangunan Tingkat Kecamatan (PUSDATIN)
15	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kec. Kaliwedi	1 paket	Jumlah data statistik sektoral yang dihimpun	Rp. 19.330.000	Pemutakhiran data pembangunan Tingkat Kecamatan (PUSDATIN)
16	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kec. Talun	1 paket	Jumlah data statistik sektoral yang dihimpun	Rp. 17.795.000	Pemutakhiran data pembangunan Tingkat Kecamatan (PUSDATIN)
17	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kec. Kedawung	1 paket	Jumlah data statistik sektoral yang dihimpun	Rp. 19.860.000	Pemutakhiran data pembangunan Tingkat Kecamatan (PUSDATIN)

No	Sub Kegiatan	Lokasi	Volume	Indikator Kinerja	Volume	Alasan
18	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kec. Gunungjati	1 paket	Jumlah data statistik sektoral yang dihimpun	Rp. 15.750.000	Pemutakhiran data pembangunan Tingkat Kecamatan (PUSDATIN)
19	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kec. Kapetakan	1 paket	Jumlah data statistik sektoral yang dihimpun	Rp. 19.330.000	Pemutakhiran data pembangunan Tingkat Kecamatan (PUSDATIN)
20	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kec. Tengahtani	1 paket	Jumlah data statistik sektoral yang dihimpun	Rp. 19.860.000	Pemutakhiran data pembangunan Tingkat Kecamatan (PUSDATIN)
21	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kec. Suranenggala	1 paket	Jumlah data statistik sektoral yang dihimpun	Rp. 19.330.000	Pemutakhiran data pembangunan Tingkat Kecamatan (PUSDATIN)
22	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kec. Losari	1 paket	Jumlah data statistik sektoral yang dihimpun	Rp. 18.600.000	Pemutakhiran data pembangunan Tingkat Kecamatan (PUSDATIN)
23	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kec. Pabedilan	1 paket	Jumlah data statistik sektoral yang dihimpun	Rp. 16.810.000	Pemutakhiran data pembangunan Tingkat Kecamatan (PUSDATIN)
24	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kec. Babakan	1 paket	Jumlah data statistik sektoral yang dihimpun	Rp. 16.280.000	Pemutakhiran data pembangunan Tingkat Kecamatan (PUSDATIN)
25	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kec. Sedong	1 paket	Jumlah data statistik sektoral yang dihimpun	Rp. 18.600.000	Pemutakhiran data pembangunan Tingkat Kecamatan (PUSDATIN)
26	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kec. Pangenan	1 paket	Jumlah data statistik sektoral yang dihimpun	Rp. 19.330.000	Pemutakhiran data pembangunan Tingkat Kecamatan (PUSDATIN)
27	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kec. Gebang	1 paket	Jumlah data statistik sektoral yang dihimpun	Rp. 16.810.000	Pemutakhiran data pembangunan Tingkat Kecamatan (PUSDATIN)
28	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kec. Waled	1 paket	Jumlah data statistik sektoral yang dihimpun	Rp. 17.340.000	Pemutakhiran data pembangunan Tingkat Kecamatan (PUSDATIN)

No	Sub Kegiatan	Lokasi	Volume	Indikator Kinerja	Volume	Alasan
29	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kec. Ciledug	1 paket	Jumlah data statistik sektoral yang dihimpun	Rp. 18.600.000	Pemutakhiran data pembangunan Tingkat Kecamatan (PUSDATIN)
30	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kec. Karangsembung	1 paket	Jumlah data statistik sektoral yang dihimpun	Rp. 19.860.000	Pemutakhiran data pembangunan Tingkat Kecamatan (PUSDATIN)
31	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kec. Lemahabang	1 paket	Jumlah data statistik sektoral yang dihimpun	Rp. 16.810.000	Pemutakhiran data pembangunan Tingkat Kecamatan (PUSDATIN)
32	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kec. Pasaleman	1 paket	Jumlah data statistik sektoral yang dihimpun	Rp. 20.490.000	Pemutakhiran data pembangunan Tingkat Kecamatan (PUSDATIN)
33	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kec. Pabuaran	1 paket	Jumlah data statistik sektoral yang dihimpun	Rp. 20.490.000	Pemutakhiran data pembangunan Tingkat Kecamatan (PUSDATIN)
34	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kec. Susukan Lebak	1 paket	Jumlah data statistik sektoral yang dihimpun	Rp. 18.810.000	Pemutakhiran data pembangunan Tingkat Kecamatan (PUSDATIN)
35	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kec. Astanajapura	1 paket	Jumlah data statistik sektoral yang dihimpun	Rp. 17.795.000	Pemutakhiran data pembangunan Tingkat Kecamatan (PUSDATIN)
36	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kec. Beber	1 paket	Jumlah data statistik sektoral yang dihimpun	Rp. 18.600.000	Pemutakhiran data pembangunan Tingkat Kecamatan (PUSDATIN)
37	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kec. Greged	1 paket	Jumlah data statistik sektoral yang dihimpun	Rp. 18.600.000	Pemutakhiran data pembangunan Tingkat Kecamatan (PUSDATIN)
38	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kec. Mundu	1 paket	Jumlah data statistik sektoral yang dihimpun	Rp. 17.340.000	Pemutakhiran data pembangunan Tingkat Kecamatan (PUSDATIN)
39	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kec. Karangwareng	1 paket	Jumlah data statistik sektoral yang dihimpun	Rp. 19.330.000	Pemutakhiran data pembangunan Tingkat Kecamatan (PUSDATIN)

Sementara, berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah pada hari Kamis, 09 Februari 2023 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon disampaikan sebagai berikut :

a. Peserta

Peserta yang diundang dalam acara pertemuan Forum Perangkat Daerah, yaitu :

- Kepala bappelitbangda Kabupaten Cirebon
- Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon
- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon
- Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Cirebon
- Camat se-Kabupaten Cirebon
- Ketua Komisi Informasi Kabupaten Cirebon
- Kepala BPS Kabupaten Cirebon
- Kelompok Informasi Masyarakat Kabupaten Cirebon
- RTIK Kabupaten Cirebon

b. Hasil Pelaksanaan

Beberapa poin penting yang perlu disampaikan sebagai berikut :

- Forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika maupun Perangkat Daerah lain, bertujuan untuk mensinergikan program dan kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan hasil musrenbang Kecamatan serta arah kebijakan Diskominfo Kabupaten Cirebon;
- Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika menyampaikan rencana kerja tahun 2024 beserta usulan pagu yang menjadi rancangan awal rencana kerja, guna mendukung SPBE;
- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menyampaikan tentang arah kebijakan Diskominfo Kabupaten Cirebon Tahun 2024 diantaranya kebijakan Satu data Kabupaten Cirebon dan SPBE;
- Diskominfo pada tahun 2024 mengimplementasikan program kegiatan berdasarkan Perubahan Renstra 2019-2024 dan melaksanakan indikator kinerja tahun 2020-2024;
- Diskominfo merupakan perangkat daerah yang mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik dimana semua aktivitas baik dari segi perencanaan, penganggaran, atau pun pengawasan ikut terlibat dalam mendukung konektivitas jaringan dan pembangunan aplikasi pendukungnya;

- Menindaklanjuti kegiatan prioritas, sasaran yang disertai target dan kebutuhan sebagaimana tercantum dalam Daftar Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah Tahun 2024;
- Usulan program dan kegiatan yang belum disepakati dalam forum Perangkat Daerah, serta hasil pembahasan forum Perangkat Daerah agar ditindaklanjuti..

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dilakukan sebagai acuan dan sumber masukan penting bagi pengembangan dan penentuan isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.

3.1.1 Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden

Visi Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin Tahun 2019-2024 adalah "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong. Pada pelaksanaannya, pencapaian visi tersebut dilakukan sesuai tugas Dinas Komunikasi dan Informatika yang disebutkan pada Peraturan Bupati Cirebon Nomot 17 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis memberi pengaruh yang sangat signifikan bagi penentuan isu strategis bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik adalah bagian penting dari perwujudan pemerintahan yang demokratis dan terpercaya. Sedangkan penerapan SPBE dan peran sebagai wali data sektoral yang handal akan menciptakan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

3.1.2 Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

Renstra Kemenkominfo tahun 2020-2024 memetakan arah pembangunan nasional ke dalam 3 (tiga) tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pembangunan bidang komunikasi dan informatika, yaitu :

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi; dan

3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Tabel 3.1
Telaahan Sasaran Renstra
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

No	Sasaran Jangka menengah Renstra Kementerian	Permasalahan Pelayanan Diskominfo Kab. Cirebon	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau	Masih rendahnya dukungan keberlanjutan program dan anggaran	1. Keterbatasan anggaran 2. Masih rendahnya komitmen pengelola sumber daya komunikasi dan informatika	Adanya kesamaan fungsi dan peran
2.	Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital	Belum dijadikan prioritas	1. Keterbatasan kewenangan Kabupaten 2. Belum dilaksanakannya tata kelola layanan yang efektif	Kebutuhan akan informasi semakin tinggi
3.	Meningkatnya konektivitas layanan pos	Tidak adanya kewenangan terkait layanan pos	1. Keterbatasan kewenangan Kabupaten 2. Belum dilaksanakannya tata kelola layanan yang efektif	Kebutuhan masyarakat terhadap layanan pos, komunikasi dan informatika makin tinggi
4.	Terwujudnya konektivitas <i>Next Generation Broadband</i> nasional	Belum dijadikan prioritas	Belum terciptanya instrumen yang dapat mengembangkan NGN	Kewajiban meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
5.	Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika	Belum tersedia standar alat, standar mutu layanan, dan mekanisme pengawasan	1. Regulasi kewenangan belum terimplementasikan 2. Keterbatasan kapasitas sumber daya	Kewajiban Perlindungan Konsumen
6.	Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis	Masih rendahnya dukungan keberlanjutan program dan anggaran	Keterbatasan kapasitas sumberdaya	Adanya dokumen dalam mengembangkan TIK di sector ekonomi dan bisnis
7.	Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital	Masyarakat belum sepenuhnya memanfaatkan TIK	Keterbatasan kapasitas sumberdaya	Tersedianya fasilitas digital di beberapa titik lokasi
8.	Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah	Belum dilakukan secara optimal pemanfaatan potensi bidang komunikasi dan informatika	Keterbatasan kapasitas sumber daya	Adanya Perda terkait e-government
9.	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Belum optimalnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	1. Keterbatasan Anggaran 2. Masih rendahnya komitmen pengelola sumber daya komunikasi dan informatika	Adanya kesamaan fungsi dan peran
10.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Masih rendahnya dukungan keberlanjutan program dan anggaran	Komitmen aparat	Transparansi kinerja

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagai upaya mendukung pencapaian indikator keberhasilan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Cirebon khususnya misi ke-4 yaitu *“Meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah”*, maka telah ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang menjadi urusan/kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon yaitu Indeks SPBE seperti yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2019-2024

Adapun tujuan jangka menengah yang akan dicapai Diskominfo Kabupaten Cirebon dalam rangka pencapaian visi dan misi tersebut seperti tertuang dalam Renstra Diskominfo Kabupaten Cirebon yaitu: *“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel”*.

Tujuan tersebut menggunakan sasaran yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi
- 2) Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik
- 3) Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
- 4) Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- 5) Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon

Penjabaran tujuan dan sasaran kinerja Diskominfo Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Diskominfo Kabupaten Cirebon

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun ke -					Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Akhir Renstra
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.63 POIN	2.78	2.93	3.00	3.10	3.20	
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	2.57 POIN	2.57	2.67	2.77	2.87	2.97	
		Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	55.25 PERSEN	56.63	40	45	50	57	
		Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral	36,50 %	40	52.50	65	77.50	90	
		Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	II LEVEL	II	II	II	II	II	
		Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Indeks Kepuasan Masyarakat	- POIN	3.55	3.57	3.59	3.61	3.63	

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

3.3.1 Faktor-faktor yang menjadi Bahan Pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadikan bahan pertimbangan perangkat daerah dalam merumuskan program dan kegiatan adalah :

1) Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Pencapaian program dan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Cirebon terpilih, sehingga program dan kegiatan dalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati Cirebon yaitu pada misi ke IV "Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih

maju dan unggul sehingga menambah daya saing dipasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah”.

2) Pencapaian SDGs

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs)* adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Adapun program/kegiatan yang merupakan acuan untuk pencapaian SDGs yaitu terkait urusan komunikasi dan informatika.

3) Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius. Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Cirebon. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun anggaran 2024 yang akan datang diarahkan pula

untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan membangun dan mengembangkan pelayanan publik berbasis IT serta pembinaan masyarakat sebagai wujud meningkatkan keterampilan di bidang IT.

4) Pencapaian NSPK dan SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar. Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Dinas Komunikasi dan informatika diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

5) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai sebuah perangkat daerah di Kabupaten Cirebon memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Cirebon. Potensi itu terutama terkait dengan menara telekomunikasi yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon melalui retribusi. Selain itu, program kegiatan yang bersentuhan dengan IT seperti promosi wisata Cirebon merupakan wujud dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah. Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap

kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kabupaten Cirebon melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

3.3.2 Uraian Garis Besar mengenai Program dan Kegiatan

- a. Jumlah program dan jumlah kegiatan
Jumlah program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 adalah 5 program dengan 11 kegiatan dan 34 sub kegiatan.
- b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan informatika sifat penyebarannya di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon dan melingkupi Desa/Kelurahan.
- c. Total kebutuhan dana/pagu indikatof yang dirinci menurut sumber pendanaan
Kebutuhan dana/pagu indikatif hanya bersumber dari APBD Kabupaten Cirebon.

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Cirebon

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0,	NON URUSAN				6.286.894.760				19.355.800.000
0.00.	NON BIDANG URUSAN				6.286.894.760				19.355.800.000
0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		100 PERSEN	714.887.280			100 PERSEN	5.735.000.000
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		100 PERSEN	903.120.080			100 PERSEN	7.245.800.000
		Terpenuhinya peningkatan disiplin aparatur dalam berpakaian dinas		100 PERSEN	0			100 PERSEN	100.000.000
		Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan		100 PERSEN	4.435.691.200			100 PERSEN	5.895.000.000
		Persentase dokumen perencanaan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan		100 PERSEN	233.196.200			100 PERSEN	380.000.000
0.00.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang dibuat dalam satu tahun		17 Dokumen	233.196.200	PIS		17 Dokumen	380.000.000
0.00.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskominfo Kabupaten Cirebon	5 Dokumen	115.658.700	PIS		5 Dokumen	180.000.000
0.00.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Diskominfo Kabupaten Cirebon	12 Laporan	117.537.500	PIS		12 Laporan	200.000.000

Kode (1)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) (3)	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi (4)	Target Capaian Kinerja (5)	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (6)	Sumber Dana (7)	Catatan Penting (8)	Target Capaian Kinerja (9)	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (10)
0.00.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan keuangan daerah yang dibuat dalam satu tahun		14 Dokumen	4.435.691.200	PIS		14 Dokumen	5.895.000.000
0.00.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Cirebon	30 Orang/bulan	4.279.551.000	PIS		30 Orang/bulan	5.545.000.000
0.00.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Diskominfo Kabupaten Cirebon	1 Laporan	16.275.000	PIS		1 Laporan	150.000.000
0.00.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Diskominfo Kabupaten Cirebon	13 Laporan	139.865.200	PIS		13 Laporan	200.000.000
0.00.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis pakaian dinas/ pakaian khusus hari-hari tertentu beserta kelengkapannya yang disediakan		1 Jenis	0	PIS		1 Jenis	100.000.000
0.00.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Diskominfo Kabupaten Cirebon	1 Paket	0	PIS		1 Paket	100.000.000
0.00.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah yang disediakan		9 Layanan	305.187.680	PIS		9 Layanan	5.235.000.000
0.00.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Diskominfo Kabupaten Cirebon	4 Paket	8.266.800	PIS		4 Paket	20.000.000
0.00.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Pertengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Pertengkapan Kantor yang Disediakan	Diskominfo Kabupaten Cirebon	24 Paket	92.083.380	PIS		24 Paket	4.600.000.000
0.00.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Diskominfo Kabupaten Cirebon	25 Paket	5.875.400	PIS		25 Paket	35.000.000
0.00.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Diskominfo Kabupaten Cirebon	12 Paket	0	PIS		12 Paket	10.000.000
0.00.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Diskominfo Kabupaten Cirebon	12 Paket	16.008.200	PIS		12 Paket	30.000.000

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.00.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Diskominfo Kabupaten Cirebon	16 Dokumen	28.675.800	PIS		16 Dokumen	75.000.000
0.00.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Diskominfo Kabupaten Cirebon	12 Paket	50.918.100	PIS		12 Paket	75.000.000
0.00.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Diskominfo Kabupaten Cirebon	12 Laporan	3.000.000	PIS		12 Laporan	15.000.000
0.00.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskominfo Kabupaten Cirebon	220 Laporan	100.360.000	PIS		220 Laporan	375.000.000
0.00.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah penunjang urusan yang disediakan		2 Jenis	107.035.080	PIS		2 Jenis	1.725.000.000
0.00.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Diskominfo Kabupaten Cirebon	3 Unit	-	PIS		3 Unit	1.500.000.000
0.00.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Diskominfo Kabupaten Cirebon	15 Unit	107.035.080	PIS		15 Unit	225.000.000
0.00.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan yang disediakan		6 Jenis	769.699.600	PIS		6 Jenis	1.250.000.000
0.00.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Diskominfo Kabupaten Cirebon	36 Laporan	409.699.600	PIS		36 Laporan	500.000.000
0.00.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Diskominfo Kab Cirebon	36 Laporan	360.000.000	PIS		36 Laporan	750.000.000
0.00.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis sarana dan prasarana yang dipelihara		8 Jenis	436.085.000	PIS		8 Jenis	4.770.800.000
0.00.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Diskominfo Kabupaten Cirebon	16 Unit	107.792.000	PIS		16 Unit	200.000.000

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.00.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Diskominfo Kabupaten Cirebon	24 Unit	6.945.000	PIS		24 Unit	25.800.000
0.00.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Diskominfo Kab Cirebon	50 Unit	29.200.000	PIS		50 Unit	45.000.000
0.00.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Diskominfo Kabupaten Cirebon	2 Unit	292.148.000	PIS		2 Unit	4.500.000.000
2,	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERTKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9.704.722.584				114.033.000.000
2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				8.783.806.384				107.243.000.000
2.16.02.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah		80 Persen	2.410.615.400			80 Persen	6.435.000.000
2.16.02.2.01.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media informasi dan komunikasi publik yang digunakan		5 Media	2.410.615.400	PIS		5 Media	6.435.000.000
2.16.02.2.01.01.	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	3 Dokumen	0	PIS		3 Dokumen	350.000.000
2.16.02.2.01.02.	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	12 Dokumen	53.350.000	PIS		12 Dokumen	265.000.000
2.16.02.2.01.04.	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	12 Dokumen	146.304.800	PIS		12 Dokumen	400.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.16.02.2.01.05.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	14 Dokumen	93.762.300	PIS		14 Dokumen	410.000.000
2.16.02.2.01.06.	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	12 Dokumen	673.304.400	PIS		12 Dokumen	1.000.000.000
2.16.02.2.01.07.	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	36 Layanan	1.029.484.600	PIS		36 Layanan	2.500.000.000
2.16.02.2.01.10.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	400 Orang	0	PIS		400 Orang	510.000.000
2.16.02.2.01.11.	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	12 Dokumen	324.939.300	PIS		12 Dokumen	500.000.000
2.16.02.2.01.12.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	12 Dokumen	89.470.000	PIS		12 Dokumen	500.000.000
2.16.03.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan pengelolaan aplikasi informatika		94 Persen	6.373.190.984			94 Persen	100.808.000.000
2.16.03.2.01.	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		73 Perangkat daerah	3.931.955.019	Banprov, PIS		73 Perangkat daerah	30.248.000.000

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah domain utama yang diperpanjang layanannya		1 Domain		PIS		1 Domain	
2.16.03.2.01.02.	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	1 Dokumen	0	PIS		1 Dokumen	248.000.000
2.16.03.2.01.03.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	2 Unit	3.931.955.019	PIS		2 Unit	30.000.000.000
2.16.03.2.02.	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		9 layanan	2.441.235.965	PIS		9 layanan	70.560.000.000
2.16.03.2.02.01.	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	10 Dokumen	195.942.300	PIS		10 Dokumen	700.000.000
2.16.03.2.02.03.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	2 Unit	1.755.276.665	PIS		2 Unit	11.300.000.000
2.16.03.2.02.04.	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	1 Dokumen	0	PIS		1 Dokumen	500.000.000
2.16.03.2.02.06.	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	73 Perangkat Daerah	0	PIS		73 Perangkat Daerah	750.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.16.03.2.02.07.	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	5 Unit	430.017.000	PIS		5 Unit	800.000.000
2.16.03.2.02.08.	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	9 Layanan	0	PIS		9 Layanan	55.500.000.000
2.16.03.2.02.09.	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	12 Dokumen	60.000.000	PIS		12 Dokumen	390.000.000
2.16.03.2.02.10.	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	12 Dokumen	0	PIS		12 Dokumen	520.000.000
2.16.03.2.02.11.	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	1 Dokumen	0	PIS		1 Dokumen	100.000.000
2.20.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				791.012.200				3.890.000.000
2.20.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		100 Persen	791.012.200			100 Persen	3.890.000.000
2.20.02.2.01.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		31 perangkat daerah	791.012.200	PIS		31 perangkat daerah	3.890.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.20.02.2.01.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	1 Dokumen	0	PIS		1 Dokumen	500.000.000
2.20.02.2.01.03.	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	3 Dokumen	0	PIS		3 Dokumen	400.000.000
2.20.02.2.01.05.	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	2 Unit	0	PIS		2 Unit	650.000.000
2.20.02.2.01.06.	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	3 Dokumen	791.012.200	PIK, PIS		3 Dokumen	2.340.000.000
2.21.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				129.904.000				2.900.000.000
2.21.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah		57,2 Persen	129.904.000			57,2 Persen	2.900.000.000
2.21.02.2.01.	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi dan atau aplikasi persandian		1 sistem elektronik	129.904.000	PIS		1 sistem elektronik	2.050.000.000
2.21.02.2.01.02.	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	12 Laporan	0	PIS		12 Laporan	450.000.000

Kode (1)	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) (3)	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi (4)	Target Capaian Kinerja (5)	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (6)	Sumber Dana (7)	Catatan Penting (8)	Target Capaian Kinerja (9)
2.21.02.2.01.03.	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	12 Laporan	0	PIS	12 Laporan	800.000.000
2.21.02.2.01.04.	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	73 Perangkat Daerah	129.904.000	PIS	73 Perangkat Daerah	800.000.000
2.21.02.2.02.	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah titik yang diamankan pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS)		31 Titik	0	PIS	31 Titik	850.000.000
2.21.02.2.02.01.	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	73 Perangkat Daerah		PIS	73 Perangkat Daerah	850.000.000
J U M L A H					15.991.617.344			133.388.800.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Diskominfo Kabupaten Cirebon untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Kabupaten

Memperhatikan arah kebijakan Nasional tahun 2024 dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2024, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Diskominfo Kabupaten Cirebon yaitu merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah, Diskominfo Kabupaten Cirebon secara langsung mendukung Prioritas Kabupaten dalam kaitan pencapaian Program Prioritas Kabupaten dimaksud, Diskominfo memiliki program/kegiatan strategis sesuai dengan perubahan RPJMD 2019-2024 sebagai berikut:

1. Penguatan Layanan Publik
2. Dukungan Cirebon Aman
3. Dukungan *Virtual Meeting* Musrenbang
4. Integrasi Aplikasi Super Apps
5. Dukungan layanan kependudukan
6. Dukungan penataan taman PKK Sumber
7. Keterbukaan Informasi Publik

4.2 Prioritas Perangkat Daerah

Berdasarkan uraian diatas, rencana kerja dan kegiatan prioritas Diskominfo Kabupaten Cirebon Tahun 2024, adalah sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Prioritas Perangkat Daerah

No	Prioritas Perangkat Daerah	Target	Lokasi	Kode Prog/Keg/ Sub. Keg	Program/Kegiatan Sub. Kegiatan	Pagu Dana	Keterangan
1	Integrasi Aplikasi	1 paket	Kabupaten Cirebon	2.16.03.2.02.07.	Program Aplikasi Informatika Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan berbasis Elektronik	350.000.000	Integrasi aplikasi super apps
2	Pembangunan Backbone	1 paket	Kabupaten Cirebon	2.16.03.2.01.03.	Program Aplikasi Informatika Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	250.229.000	Penguatan layanan publik
3	MPLS	1 paket	Kabupaten Cirebon	2.16.03.2.01.03.	Program Aplikasi Informatika Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	900.000.000	Dukungan layanan kependudukan
5	Virtual meeting	1 paket	Kabupaten Cirebon	2.16.03.2.01.03.02.	Program Aplikasi Informatika Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	390.000.000	Dukungan kegiatan musrenbang
6	CCTV	1 paket	Kabupaten Cirebon	2.16.03.2.01.03.02.	Program Aplikasi Informatika Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	420.000.000	Dukungan Cirebon AMAN

No	Prioritas Perangkat Daerah	Target	Lokasi	Kode Prog/Keg/ Sub. Keg	Program/Kegiatan Sub. Kegiatan	Pagu Dana	Keterangan
6	Videotron	1 paket	Kabupaten Cirebon	2.16.03.2.01.03.02.	Program Aplikasi Informatika Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1.000.000.000	Dukungan penataan Taman PKK Sumber
7	Penguatan Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon	1 paket	Kabupaten Cirebon	2.16.03.2.01.03.02.	Program Informasi dan Komunikasi Publik Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	279.000.000	Dukungan Keterbukaan Informasi Publik

4.3 Rencana Kerja dan Pendanaan

Dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dan rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Diskominfo Kabupaten Cirebon tahun 2024, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024, diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Diskominfo Kabupaten Cirebon, sebagai berikut:

1. perumusan bahan perencanaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
3. pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
4. pengelolaan aplikasi informatika;
5. pengelolaan statistik sektoral;
6. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
7. pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
8. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 4.2

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Cirebon

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0,	NON URUSAN				6.286.894.760				19.355.800.000
0.00.	NON BIDANG URUSAN				6.286.894.760				19.355.800.000
0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		100 PERSEN	714.887.280			100 PERSEN	5.735.000.000
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		100 PERSEN	903.120.080			100 PERSEN	7.245.800.000
		Terpenuhinya peningkatan disiplin aparatur dalam berpakaian dinas		100 PERSEN	0			100 PERSEN	100.000.000
		Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan		100 PERSEN	4.435.691.200			100 PERSEN	5.895.000.000
		Persentase dokumen perencanaan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan		100 PERSEN	233.196.200			100 PERSEN	380.000.000
0.00.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang dibuat dalam satu tahun		17 Dokumen	233.196.200	PIS		17 Dokumen	380.000.000
0.00.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskominfo Kabupaten Cirebon	5 Dokumen	115.658.700	PIS		5 Dokumen	180.000.000
0.00.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Diskominfo Kabupaten Cirebon	12 Laporan	117.537.500	PIS		12 Laporan	200.000.000

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.00.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan keuangan daerah yang dibuat dalam satu tahun	Kabupaten Cirebon	14 Dokumen	4.435.691.200	PIS		14 Dokumen	5.895.000.000
0.00.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Cirebon	30 Orang/bulan	4.279.551.000	PIS		30 Orang/bulan	5.545.000.000
0.00.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Diskominfo Kabupaten Cirebon	1 Laporan	16.275.000	PIS		1 Laporan	150.000.000
0.00.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Diskominfo Kabupaten Cirebon	13 Laporan	139.865.200	PIS		13 Laporan	200.000.000
0.00.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis pakaian dinas/ pakaian khusus hari-hari tertentu beserta kelengkapannya yang disediakan		1 Jenis	0	PIS		1 Jenis	100.000.000
0.00.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Diskominfo Kabupaten Cirebon	1 Paket	0	PIS		1 Paket	100.000.000
0.00.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah yang disediakan		9 Layanan	305.187.680	PIS		9 Layanan	5.235.000.000
0.00.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Diskominfo Kabupaten Cirebon	4 Paket	8.266.800	PIS		4 Paket	20.000.000
0.00.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Diskominfo Kabupaten Cirebon	24 Paket	92.083.380	PIS		24 Paket	4.600.000.000
0.00.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Diskominfo Kabupaten Cirebon	25 Paket	5.875.400	PIS		25 Paket	35.000.000
0.00.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Diskominfo Kabupaten Cirebon	12 Paket	0	PIS		12 Paket	10.000.000
0.00.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Diskominfo Kabupaten Cirebon	12 Paket	16.008.200	PIS		12 Paket	30.000.000

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025			
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0.00.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Diskominfo Kabupaten Cirebon	16 Dokumen	28.675.800	PIS		16 Dokumen	75.000.000		
0.00.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Diskominfo Kabupaten Cirebon	12 Paket	50.918.100	PIS		12 Paket	75.000.000		
0.00.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Diskominfo Kabupaten Cirebon	12 Laporan	3.000.000	PIS		12 Laporan	15.000.000		
0.00.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskominfo Kabupaten Cirebon	220 Laporan	100.360.000	PIS		220 Laporan	375.000.000		
0.00.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah penunjang urusan yang disediakan		2 Jenis	107.035.080	PIS		2 Jenis	1.725.000.000		
0.00.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Diskominfo Kabupaten Cirebon	3 Unit	-	PIS		3 Unit	1.500.000.000		
0.00.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Diskominfo Kabupaten Cirebon	15 Unit	107.035.080	PIS		15 Unit	225.000.000		
0.00.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan yang disediakan		6 Jenis	769.699.600	PIS		6 Jenis	1.250.000.000		
0.00.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Diskominfo Kabupaten Cirebon	36 Laporan	409.699.600	PIS		36 Laporan	500.000.000		
0.00.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Diskominfo Kab Cirebon	36 Laporan	360.000.000	PIS		36 Laporan	750.000.000		
0.00.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis sarana dan prasarana yang dipelihara		8 Jenis	436.085.000	PIS		8 Jenis	4.770.800.000		
0.00.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Diskominfo Kabupaten Cirebon	16 Unit	107.792.000	PIS		16 Unit	200.000.000		

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.00.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Diskominfo Kabupaten Cirebon	24 Unit	6.945.000	PIS		24 Unit	25.800.000
0.00.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Diskominfo Kab Cirebon	50 Unit	29.200.000	PIS		50 Unit	45.000.000
0.00.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Diskominfo Kabupaten Cirebon	2 Unit	292.148.000	PIS		2 Unit	4.500.000.000
2,	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERTKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9.704.722.584				114.033.000.000
2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				8.783.806.384				107.243.000.000
2.16.02.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah		80 Persen	2.410.615.400			80 Persen	6.435.000.000
2.16.02.2.01.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media informasi dan komunikasi publik yang digunakan		5 Media	2.410.615.400	PIS		5 Media	6.435.000.000
2.16.02.2.01.01.	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	3 Dokumen	0	PIS		3 Dokumen	350.000.000
2.16.02.2.01.02.	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	12 Dokumen	53.350.000	PIS		12 Dokumen	265.000.000
2.16.02.2.01.04.	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	12 Dokumen	146.304.800	PIS		12 Dokumen	400.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.16.02.2.01.05.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	14 Dokumen	93.762.300	PIS		14 Dokumen	410.000.000
2.16.02.2.01.06.	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	12 Dokumen	673.304.400	PIS		12 Dokumen	1.000.000.000
2.16.02.2.01.07.	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	36 Layanan	1.029.484.600	PIS		36 Layanan	2.500.000.000
2.16.02.2.01.10.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	400 Orang	0	PIS		400 Orang	510.000.000
2.16.02.2.01.11.	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	12 Dokumen	324.939.300	PIS		12 Dokumen	500.000.000
2.16.02.2.01.12.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	12 Dokumen	89.470.000	PIS		12 Dokumen	500.000.000
2.16.03.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan pengelolaan aplikasi informatika		94 Persen	6.373.190.984			94 Persen	100.808.000.000
2.16.03.2.01.	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		73 Perangkat daerah	3.931.955.019	Banprov, PIS		73 Perangkat daerah	30.248.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.16.03.2.01.02.	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah domain utama yang diperpanjang layanannya	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	1 Dokumen	0	PIS		1 Domain	248.000.000
2.16.03.2.01.03.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	2 Unit	3.931.955.019	PIS		2 Unit	30.000.000.000
2.16.03.2.02.	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		9 layanan	2.441.235.965	PIS		9 layanan	70.560.000.000
2.16.03.2.02.01.	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	10 Dokumen	195.942.300	PIS		10 Dokumen	700.000.000
2.16.03.2.02.03.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	2 Unit	1.755.276.665	PIS		2 Unit	11.300.000.000
2.16.03.2.02.04.	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	1 Dokumen	0	PIS		1 Dokumen	500.000.000
2.16.03.2.02.06.	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	73 Perangkat Daerah	0	PIS		73 Perangkat Daerah	750.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.16.03.2.02.07.	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	5 Unit	430.017.000	PIS		5 Unit	800.000.000
2.16.03.2.02.08.	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	9 Layanan	0	PIS		9 Layanan	55.500.000.000
2.16.03.2.02.09.	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	12 Dokumen	60.000.000	PIS		12 Dokumen	390.000.000
2.16.03.2.02.10.	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	12 Dokumen	0	PIS		12 Dokumen	520.000.000
2.16.03.2.02.11.	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	1 Dokumen	0	PIS		1 Dokumen	100.000.000
2.20.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				791.012.200				3.890.000.000
2.20.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		100 Persen	791.012.200			100 Persen	3.890.000.000
2.20.02.2.01.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		31 perangkat daerah	791.012.200	PIS		31 perangkat daerah	3.890.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.20.02.2.01.01.	(2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	(3) Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	1 Dokumen	0	PIS	1 Dokumen	500.000.000	
2.20.02.2.01.03.	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	3 Dokumen	0	PIS	3 Dokumen	400.000.000	
2.20.02.2.01.05.	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	2 Unit	0	PIS	2 Unit	650.000.000	
2.20.02.2.01.06.	Penyelenggaraan Otomatisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	3 Dokumen	791.012.200	PIK, PIS	3 Dokumen	2.340.000.000	
2.21.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				129.904.000			2.900.000.000	
2.21.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah		57,2 Persen	129.904.000		57,2 Persen	2.900.000.000	
2.21.02.2.01.	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi dan atau aplikasi persandian		1 sistem elektronik	129.904.000	PIS	1 sistem elektronik	2.050.000.000	
2.21.02.2.01.02.	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	12 Laporan	0	PIS	12 Laporan	450.000.000	

Kode (1)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) (3)	Rencana Tahun 2024					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi (4)	Target Capaian Kinerja (5)	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (6)	Asal Ajuan (7)	Catatan Penting (8)	Target Capaian Kinerja (9)	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (10)
2.21.02.2.01.03.	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	12 Laporan	0	PIS		12 Laporan	800.000.000
2.21.02.2.01.04.	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	73 Perangkat Daerah	129.904.000	PIS		73 Perangkat Daerah	800.000.000
2.21.02.2.02.	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah titik yang diamankan pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS)		31 Titik	0	PIS		31 Titik	850.000.000
2.21.02.2.02.01.	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	73 Perangkat Daerah	0	PIS		73 Perangkat Daerah	850.000.000
J U M L A H									133.388.800.000
								15.991.617.344	850.000.000

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon disusun sejalan dengan tema RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dan penjabaran dari tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam Renstra yaitu "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel."

Diharapkan melalui Renja yang disusun dengan mekanisme perencanaan yang komprehensif dan terpadu ini, kinerja pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dapat semakin fokus untuk menyelesaikan berbagai permasalahan aktual yang masih dihadapi saat ini.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka pelaksanaan renja tahun 2024, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan supaya program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan harapan pembangunan. Adapun beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a. Dalam melaksanakan Renja Dinas Komunikasi dan informatika ini seluruh aparatur di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan Renja tersebut dengan sebaik-baiknya;
- b. Renja Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Cirebon haruslah berpedoman kepada RKPD dan disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan propinsi supaya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan selaras dan bersinergi;
- c. Dokumen Renja ini kemudian menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024;
- d. Dokumen Renja ini digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat tahunan.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan, dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan instrumen pengendalian tersebut, diharapkan terjadi kesesuaian antara perencanaan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam target capaian pada setiap tahapan dengan pelaksanaannya, dan apabila terjadi ketidaksesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya preventif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Komitmen, konsistensi, disiplin, kerja keras, semangat, dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan di Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Cirebon mutlak diperlukan untuk tercapainya sasaran Perangkat Daerah tahun 2024.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perubahan 2019 – 2024 yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, dan sebagai bentuk perencanaan pembangunan disusun atas dasar visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan – kebijakan strategis, hal ini akan digunakan sebagai implementasi kegiatan di lapangan yang diharapkan terjadi kesinergian/keterpaduan dalam rangka gerak pelaksanaan tugas dari Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika Kabupaten Cirebon maupun seluruh *Stakeholder* sektor Perencanaan pembangunan.

Demikian gambaran singkat tentang penjabaran Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Cirebon, dengan berdasarkan azas perencanaan berbasis kinerja sebagai pokok acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan di Tahun 2024.



Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVAI
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR